

HAKIKAT KEBEBASAN BERPIKIR DAN ETIKA

Said Subhan Posangi

Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo

Email: saidsubhan70@iaingorontalo.ac.id

Abstrak

Sebuah kebenaran yang dicapai melalui berpikir sangat ditentukan oleh subyektifitas atau obyektifitas dalam berpikir. Sebagai diketahui bahwa, dalam membicarakan persoalan berpikir obyektif tidak bisa terlepas dari berpikir secara filsafati, sebab pada dasarnya filsafat mengajak manusia untuk berpikir menurut tata tertibnya (logika) dengan bebas yang tidak terikat dengan tradisi, dogma serta agama, dan dengan sedalam-dalamnya sampai ke dasar persoalan.

A. Pendahuluan

Berpikir merupakan suatu kegiatan untuk menemukan pengetahuan yang benar. Apa yang disebut benar bagi tiap orang adalah tidak sama. Oleh karenanya kegiatan proses berpikir untuk menghasilkan pengetahuan yang benar itu juga berbeda-beda. Artinya, setiap jalan pikiran mempunyai apa yang disebut sebagai kriteria kebenaran, dan kriteria kebenaran ini kemudian dijadikan sebagai sebuah landasan bagi proses penemuan kebenaran tersebut.¹ Karena perbedaan kriteria ini kemudian, maka kebenaran ada yang bersifat subyektif dan ada yang bersifat obyektif. Dimana keduanya dapat diperoleh dengan melalui proses berpikir. Karena kegiatan berpikir merupakan karakteristik dasar manusia yang membedakannya dengan makhluk yang lain. Itu sebabnya, sebagai khalifah di bumi, manusia diberi kebebasan menggunakan akal pikirannya untuk memakmurkan kehidupan, sebab pada prinsipnya manusia adalah makhluk yang beripkir, merasa, bersikap, dan bertindak.

Oleh karena itu sebuah kebenaran yang dicapai melalui berpikir sangat ditentukan oleh subyektifitas atau obyektifitas dalam berpikir. Sebagai diketahui bahwa, dalam membicarakan persoalan berpikir obyektif tidak bisa terlepas dari berpikir secara filsafati, sebab pada dasarnya filsafat mengajak manusia untuk

¹Jujun S. Sumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Cet. XVII, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003), h. 42-43

berpikir menurut tata tertibnya (logika) dengan bebas yang tidak terikat dengan tradisi, dogma serta agama, dan dengan sedalam-dalamnya sampai ke dasar persoalan.² Jadi, berpikir secara filsafati yang penulis maksudkan adalah berpikir secara mendasar, bebas dan logis yang tidak terikat oleh nilai apapun. Berpikir sebagai kegiatan filsafati individual memang tidak ada sangkut pautnya dengan kehidupan kamunal atau sosial, tetapi tidak dapat dipungkiri juga bahwa implikasi dari sebuah pemikiran adalah akan memasuki pada ranah-ranah kehidupan sosial. Dengan demikian maka, pertanyaannya kemudian adalah mungkinkah manusia berpikir sebebas-bebasnya atau justru kebebasan itu akan membawa manusia kepada ketidakbebasan ketika harus dihadapkan dengan hak kebebasan sesama manusia yang lain dalam ranah kehidupan sosial.

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang pemikiran di atas, maka tulisan ini paling tidak mencoba mengelaborasi permasalahan yang berkaitan dengan apa sesungguhnya hakikat kebebasan berpikir dan bagaimana hubungannya dengan etika.

C. Metode Penulisan

Dalam penulisan tulisan ini, penulis menggunakan analisa data deskriptif-analitik. Deskriptif digunakan untuk menemukan pandangan tentang hakekat berpikir dalam hubungannya dengan etika. Analitik, digunakan untuk menelaah konsep kebebasan berpikir serta hubungannya terhadap etika. Sedangkan cara yang digunakan adalah content analitik, yaitu dengan menganalisis konsep-konsep yang berkaitan dengan kebebasan berpikir hubungannya dengan etika.

D. Hakikat Berpikir

Paling tidak, definisi yang paling umum dari berpikir adalah perkembangan idea atau konsep, yang dalam metafisika, berpikir adalah sebuah proses kerja akal budi ketika menangkap pengalaman indrawi (realita) untuk menemukan sebuah kebenaran tentang apa yang diindra.³ Dimana, apa yang ditangkap oleh pikiran, termasuk penginderaan dari segenap pengalaman manusia, adalah bersifat mental.⁴

²Harun Nasution, *Falsafah Agama*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), h. 10

³J. M. Bochenski, "Apakah Sebenarnya Berpikir", dalam Jujun S. Suriasumantri (ed.), *Ilmu Dalam Perspektif*, Cet. XV (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001), h. 52

⁴*Ibid.*, h. 68

Mental, dapat dibagi ke dalam tiga tingkat klasifikasi yang dipresentasikan dengan perbedaan antara *afektif, kognitif dan psiokomotor*.⁵

Dalam berpikir menemukan kebenaran, manusia melakukan penalaran yakni berpikir melalui cara-cara yang logis dan sistematis. Sebagai suatu kegiatan berpikir maka penalaran mempunyai ciri-ciri tertentu.. Ciri yang *pertama* adalah adanya suatu pola berpikir yang secara luas dapat disebut logika.⁶ Dimana, kegiatan penalaran merupakan suatu proses berpikir logis dalam arti melakukan sebuah kegiatan berpikir menurut suatu pola atau logika tertentu. Ciri *Kedua* dari penalaran adalah, sifat analitik dari proses berpikirnya. Penalaran merupakan suatu kegiatan berpikir yang menyandarkan diri kepada suatu analisis, dan kerangka berpikir yang dipergunakan untuk analisis tersebut adalah logika penalaran yang bersangkutan.⁷

Atas dasar kriteria tersebut, paling tidak dapat dikatakan bahwa tidak semua kegiatan berpikir bersifat logis dan analitis. Karena, cara berpikir yang tidak logis dan analitis tidak termasuk ke dalam penalaran.⁸ Sebagai misal; perasaan enak, tidak enak, senang, atau benci. Lebih dari itu, dalam konteks ini maka intuisi merupakan suatu penarikan kesimpulan yang tidak berdasarkan penalaran. Seperti halnya intuisi, manis panas dan sebagainya adalah terminologi yang diberikan oleh manusia kepada gejala yang ditangkap melalui pancaindera. Rangsangan pancaindera ini kemudian disalurkan ke otak tanpa melalui proses berpikir nalar, dapat menghadirkan gejala tersebut melalui proses kimia-fisika. Yang oleh aliran monistik (aliran yang berpendapat tidak membedakan antara pikiran dan zat) menyatakan bahwa proses berpikir dianggap sebagai aktivitas elektrokimia dari otak.⁹

Oleh karena itu, sebagai proses elektrokimia maka berpikir adalah sebagai bebas nilai sebab pembatasannya adalah logika yang merupakan cara penarikan kesimpulan dalam berpikir, sehingga dalam proses penemuan kebenaran maka validitas sebuah hasil dari proses berpikir selalu ditentukan dan diukur dengan cara-cara tertentu secara logik baik dengan menggunakan logika deduksi maupun logika

⁵A. C. Awing, *Persoalan-persoalan Mendasar Filsafat*, terjemahan Uzair Fauzan, Rika Iffati Farikha, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), h. 162

⁶Secara luas logika dapat didefinisikan sebagai pengkajian untuk berpikir secara sah. Lihat, Wiliam S. Sahakian dan Mabel Lewis Sahakian, *Realism of Philosophy*, (Cambridge, Mass: Schenkman, 1965), h. 3

⁷Jujun S. Suriasumantri, *Ibid.*, h. 43

⁸*Ibid.*

⁹*Ibid.*,h. 66

induksi. Demikian pula, secara ontologi ilmu sebagai hasil dari proses berpikir juga bebas nilai secara total adanya.

Lebih dari itu, secara aksiologis ketika ilmu diperhadapkan dengan masalah moral, ketika termnya ilmu dan teknologi membawa akses yang merusak kehidupan, misalnya bom, senjata pemusnah massal dan sebagainya maka ini menjadi sebuah persoalan yang oleh para ilmuwan menjadi sebuah diskusi yang sangat kontroversial. Dalam konteks ini, paling tidak para ilmuwan terbagi ke dalam dua pendapat yang berbeda. Pendapat *pertama*, menginginkan bahwa ilmu harus bersifat netral terhadap nilai baik secara ontologis maupun aksiologis. Oleh karena itu, golongan ini sangat menginginkan untuk melanjutkan tradisi kenetralan ilmu secara total seperti pada waktu era Galileo. Dimana, tugas para ilmuwan adalah berpikir secara nalar untuk menemukan pengetahuan dan penggunaannya yang sepenuhnya bertanggung jawab akan segala hasil temuannya itu.¹⁰

Pendapat *kedua*, sebaliknya berpendapat bahwa netralitas ilmu terhadap nilai hanyalah terbatas pada metafisika keilmuan (ontologi), sedangkan dalam penggunaannya harus berlandaskan pada asas-asas moral. Artinya bahwa Seberapa tinggi temuan dalam bidang ilmu pengetahuan, harus terus memperhatikan manfaat dan mudaratnya untuk manusia sebagai pengguna hasil temuan ilmu pengetahuan tersebut. Tahap tertinggi dari kebudayaan moral manusia ini, kata Charles Darwin adalah ketika manusia menyadari bahwa manusia seyogyanya mengontrol pikirannya.¹¹ Lebih dari itu, Karel Jaspers mengemukakan bahwa ilmu adalah usaha manusia untuk mendengarkan jawaban-jawaban yang keluar dari dunia yang dihuninya. Disinilah paling tidak lengketnya etika dengan ilmu. Dimana, ilmu bukan tujuan tetapi sarana, karena hasrat akan kebenaran itu berkait erat dengan etika pelayanan bagi sesama manusia dan tanggung jawab secara agama.¹²

E. Hakikat Sebuah Kebebasan

Sebelum lebih jauh memperbincangkan hakikat sebuah kebebasan, maka paling tidak kebebasan yang akan kita perbincangkan disini dapat dibedakan antara **kebebasan dalam berbuat** yang terikat oleh ruang dan waktu, hukum moral dan hukum sosial, dan **kebebasan dalam berpikir** yang pada prinsipnya sangat berwatak bebas.

¹⁰*Ibid.*, h. 235

¹¹*Ibid.*

¹²N. Daldjoeni, "Hubungan Etika dengan Ilmu" dalam Yuyun Suriasumantri, *Ibid.*, h. 235

Secara sederhana kebebasan dapat dirumuskan sebagai sebuah keleluasaan untuk bertindak atau tidak bertindak berdasarkan pilihan yang tersedia bagi seseorang. Artinya, seseorang dapat dikatakan bebas jika tak ada hambatan dan larangan baginya untuk melakukan apa saja. Dimana, kebebasan muncul dari doktrin bahwa setiap orang memiliki hidupnya sendiri dan memiliki hak untuk bertindak menurut pilihannya. Dalam konteks sosial, kebebasan seseorang dibatasi oleh kebebasan orang lain.¹³ Dengan kata lain, bahwa kebebasan manusia mengandung pengertian bahwa dibalik kebebasan terdapat tanggung jawab artinya, tidak ada kebebasan tanpa tanggung jawab, dan begitu pula sebaliknya, tidak ada tanggung jawab tanpa kebebasan.

Dalam teologi Islam, kebebasan pada manusia (tidak termasuk kebebasan berpikir) selalu ada batasan dan kekuatan yang tidak bisa dilawan.¹⁴ Batasan itu bisa bersifat fisik dan bisa berupa moral keagamaan. Sebebas-bebas manusia, ia tetap terikat dengan hukum fisik, sebagai misal hukum alam membatasi manusia untuk tidak bisa mencapai semua imajinasi dan angan-angannya, terkait dengan keterbatasan ruang dan waktu. Sebab, secara moral semua tindakan manusia akan dimintai pertanggung jawabannya. Oleh karena itu, kebebasan yang sejati adalah kebebasan seseorang agar tidak terbelenggu oleh kebodohan dan kenistaan hidup. Dari sudut pandang moral keagamaan, orang yang merdeka adalah mereka yang bebas dari keterikatan dan ketundukan pada kekuatan yang menurunkan derajat kemanusiaannya.¹⁵

Berbeda dengan kebebasan bertindak atau berbuat, kebebasan berpikir tidak terikat oleh nilai-nilai tertentu. Artinya, apapun boleh dan tidak haram dipikirkan, bahkan dalam konteks mempertahankan eksistensi kebudayaan, maka kebebasan berpikir sangat mutlak diperlukan bagi sebuah kebudayaan. Misalnya, kebebasan berpikir dalam melakukan ijtihad, ini merupakan sesuatu yang amat vital dalam pengembangan kebudayaan Islam. Oleh karena itu, penutupan pintu ijtihad dalam Islam akan merupakan sebuah awal kejatuhan kebudayaan Islam.¹⁶

¹³Desi Fernanda, *Etika Organisasi Pemerintah*, (Jakarta: Lembaga Administrasi Negara, 2003), h. 16

¹⁴Harun Nasution, *Teologi Islam: Aliran-aliran, Sejarah Analisa Perbandingan*, (Jakarta: UI Press, 1986), h. 102

¹⁵Komaruddin Hidayat, *Menafsirkan Kehendak Tuhan*, (Jakarta : Penerbit Teraju, 2004), h. 218

¹⁶Musa Asy'arie, "Konsep Qur'anik tentang Strategi Kebudayaan", dalam Abdul Basir Solissa, *al-Qur'an dan Pembinaan Dialod dan Transformasi*, (Yogyakarta: LESFI, 1993), h. 10

Lebih dari itu, kebebasan berpikir tidak berarti pemutlakan terhadap hasil pemikiran, karena kebebasan berpikir tidaklah berbahaya sepanjang hasilnya tidak dipandang absolut. Sebab jika tidak, maka pemutlakan dari hasil pemikiran seseorang untuk orang lain akan menimbulkan tindakan anarkis.¹⁷ Dalam konteks ini, betapapun validnya sebuah hasil pemikiran harus dipahami dan diletakkan dalam ketidak mutlakan (kenisbian), yang bersifat terbuka menerima perubahan secara dinamis.

Lewat tinjauan filosofis dan historisnya, Harun Nasution berpendapat bahwa kebudayaan Islam dizaman klasik berkembang pesat bahkan mengambil bentuk peradaban yang tinggi, karena ada kebebasan berpikir, sehingga pemikiran menjadi terbuka dan pandangan menjadi luas. Sikap menjadi dinamis, dan pemikiran rasional dapat berkembang dengan baik.¹⁸ Dengan demikian maka kebebasan berpikir berkait erat dengan eksistensi kebudayaan dimana manusia tidak akan pernah bisa terlepas darinya. Dengan kata lain, kemajuan sebuah kebudayaan, salah satunya, ditentukan oleh adanya kebebasan berpikir. Rasio manusia harus dilatih dan dipertajam dengan memberikan dan melengkapinya dengan alat analisis untuk melihat realitas sosial dan mengevaluasi perubahan sosial secara kritis agar tidak membuat diri kita hilang dalam gelombang besar transformasi budaya, jika tidak, manusia akan tergiring oleh transformasi budaya tersebut ke dalam "kepribadian terbelah" (*split personality*).¹⁹

Dalam konteks Kebudayaan, nabi Muhammad saw telah memberikan keteladanan dalam sunnah berpikirnya yang mampu mentransendier realitas, imajinatif dan mempunyai komitmen moralitas dan kemanusiaan yang tinggi. Sunnah nabi dalam berpikir tersebut adalah berpikir dengan basis akal *qudsi*, yang disebut Ibnu Sina dengan *al-hads* yaitu kecenderungan transenden, yang dalam al-Qur'an bersendikan pada hikmah (diartikan sebagai filsafat) dan kitab al-Qur'an. Adapun prosesnya adalah dengan metode menyatukan pikir dan zikir, dan dengan kesatuan pikir dan zikir itu dikembangkan untuk memasuki pengalaman spiritual, yang akan memberikan makna yang lebih tinggi pada apa yang dilangit dan di bumi yang telah Tuhan ciptakan dengan kebenaran, bukan kebatilan, dan dengan rendah hati

¹⁷*Ibid.*, h. 11

¹⁸Harun Nasution, "Tinjauan Filosofis Tentang Pembantuan Kebudayaan Islam", dalam *Ibid.*, h. 32

¹⁹M. Amin Abdullah, *Antara Al-Gazali dan Kant: Filsafat Etika Islam*, edisi terjemahan oleh Hamzah, (Bandung: Penerbit Mizan, 2002), h. 217

memohon ampunan atas segala tindakannya yang tidak benar.²⁰ Oleh karena itu dalam kasus kebebasan berpikir dalam melakukan ijtihad, implementasinya tetap diperlukan sebuah etika. Etika dimaksud adalah sikap rendah hati dengan mengosongkan ruang batin dari egoisme sempit yang hanya mementingkan diri sendiri. Terbuka terhadap adanya kebenaran lain, dan mau mendengarkan dan mempertimbangkannya, serta bersedia menerima pendapat yang baik. Dengan etika demikian pemikirannya akan lebih terjaga dari kekeliruan.²¹

Dalam konteks visi kenabian, kebudayaan manusia termasuk berpikir adalah tanggung jawab kreatif yang berdimensi moral, artinya kebebasan kreatif yang menjadi pusat tumbuhnya kebudayaan tidak bebas nilai, baik dalam pengertian teologis maupun etis. Hanya dalam konteks ini, maka kebudayaan akan dapat menjadi ibadah seseorang kepada Tuhan, sebaliknya kebudayaan bisa menjadi perlawanan seseorang kepada hukum-hukum Tuhan, yang pada akhirnya akan menghancurkan dirinya sendiri.²²

Oleh karena itu, nilai moral yang menjadi landasan kebudayaan adalah nilai-nilai moral yang bersifat universal, yang berbasis pada kemanusiaan dan spiritual agama, yang jika disodorkan kepada seseorang, secara kodrati ia akan menerima dan menyetujuinya sebagai sebuah kebaikan. Itu sebabnya, dengan mengikatkan diri pada nilai moralitas universal tersebut, maka suatu kebudayaan akan menjadikan kehidupan ini menjadi lebih seimbang. Artinya, tidak melawan kepada kodrat hidupnya, sehingga kebudayaan menjadi sebuah bentuk kepatuhan dan ketaatan seseorang pada hukum-hukum Tuhan.

F. Hubungan Etika dan Kebebasan Berpikir

Etika, berasal dari bahasa Yunani; *ethikos*, *ethos* yang berarti kebiasaan atau watak.²³ Sebagaimana dikutip oleh Desi Fernanda mengemukakan bahwa etika (*ethics*) adalah salah satu cabang filsafat, yang mencakup filsafat moral atau pembenaran-pembenaran filosofi (*pylosophical judgment*), yang secara konseptual istilah etika memiliki kecenderungan dipandang sebagai suatu sistem nilai, apa yang baik dan buruk bagi manusia dan masyarakat. Yang dalam implementasinya etika banyak dikembangkan sebagai norma-norma yang mengatur tata kehidupan sebuah

²⁰Musa Asy'arie, *Filsafat Islam Tentang Kebudayaan*, (Yogyakarta: LESFI, 1999), h. 21-23

²¹*Ibid.*, h. 107

²²*Ibid.*, h. 24

²³Bagus Lorens, *Kamus Filsafat*, cet. II., (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Umum, 2000), h.

komunitas.²⁴ Etika tidak mempersoalkan *apa* atau *siapa* manusia itu, tetapi mempersoalkan *bagaimana manusia seharusnya berbuat atau bertindak*.

Etika yang juga disebut filsafat moral adalah cabang disiplin aksiologi yang membicarakan dan berusaha mendapatkan simpulan tentang norma-norma tindakan serta pencarian ke dalam watak moralitas atau tindakan-tindakan moral. Etika menganalisis konsep-konsep seperti keharusan, kemestian, tugas, aturan-aturan moral, benar, salah, wajib, tanggung jawab, dan lain-lain. Pembagian bidang kajian etika setidaknya menyangkut empat bidang yaitu ; *pertama*, moralitas berdasarkan kitab suci (*spiritual morality*), *kedua*, etika teologis (*theological ethics*), *ketiga*, kefilsafatan (*philosophical ethics*) dan *keempat*, moralitas keagamaan (*religious morality*).²⁵

Paling tidak, ada enam prinsip yang merupakan landasan prinsipil dari etika yaitu prinsip keindahan (*beauty*), persamaan (*equality*) kebaikan (*goodness*), keadilan (*justice*), kebebasan (*liberty*), dan prinsip kebenaran (*truth*). Pada prinsip yang terakhir ini biasanya ditakar dengan prinsip logika ilmiah yang bersifat realistik, faktual dan dapat dibuktikan. Namun ada pula kebenaran yang hanya dapat dibuktikan dengan keyakinan yaitu kebenaran teologis dan agama. Pada realitanya, kebenaran harus dapat dibuktikan dan ditunjukkan secara nyata baik itu kebenaran agama maupun kebenaran ilmiah.²⁶ Oleh karena itu, perlu ada jembatan penghubung antara kebenaran dalam pemikiran (*truth in mind*) dengan kebenaran dengan kenyataan (*truth in reality*). Jembatan dimaksud adalah norma atau hukum yang disepakati yang dapat menjamin terciptanya enam prinsip tersebut.

Norma atau hukum yang disepakati ada yang bersifat absolut dan ada yang bersifat relatif. Yang absolut kebenarannya berupa hukum-hukum Allah (*Syari'ah*), sedangkan yang bersifat relatif kebenarannya adalah hukum atau norma yang diciptakan oleh manusia misalnya hukum-hukum fikih dan hukum adat yang diciptakan oleh masyarakat komunitas sosial tertentu. Kedua norma tersebut mestinya diharapkan dapat menjembatani antara apa yang dipikirkan manusia dan kenyataan. Oleh karenanya mengukur kebenaran tergantung pada alat ukur dan jembatannya. Jika kebenaran diukur dan melalui jembatan norma yang absolut maka legitimasinya

²⁴Desi Fernanda, *Etika Organisasi Pemerintah*, (Jakarta: Lembaga Administrasi Negara, 2003), h. 2-5

²⁵Musa Asy'arie, *Filsafat Islam Sunnah Nabi dalam berpikir*, (Yogyakarta: LESFI, 1999), h. 83

²⁶*Ibid.*, h. 9

berlaku untuk siapapun yang mengakui keabsolutannya. Jika kebenarannya diukur dengan norma yang relatif seperti hukum adat maka legitimasinya pun akan bervariasi, artinya sesuatu dapat dianggap sebagai kebenaran oleh masyarakat tertentu dan dalam kasus yang sama bisa dianggap sebaliknya oleh masyarakat lain. Misalnya kriteria pornografi yang menjadi persoalan yang sangat mengkilat saat ini lewat UU anti pornografi dan pornoaksinya, apa yang dianggap oleh orang Jawa sebagai tindakan pornografi misalnya dengan membuka aurat, mungkin hal ini akan sangat tidak berlaku bagi masyarakat suku pedalaman Papua yang kesehariannya memakai koteka. Itu sebabnya maka etika sangat berkaitan erat dengan moral.

G. Penutup

Manusia, sesuai dengan fitrahnya diberikan kebebasan untuk berpikir apa saja. Tetapi harus memperhatikan aspek etika dan moral dalam berpikir. Secara ontologis kebebasan berpikir tidak terikat dengan nilai, tetapi implikasi dari kebebasan berpikir itu secara aksiologis dibatasi dengan tanggung jawab dan moral. Hanya sebagian filosof Barat seperti Galileo Galilei dan para pengikutnya yang membebaskan manusia berpikir sebeb- bebasnya. Kebebasan itu tidak adasangkut pautnya dengan nilai, sehingga mereka berpendapat bahwa ilmu sebagai produk pemikiran, adalah bebas nilai secara total.

Menurut filsafat Islam, dimana dasar pijakannya adalah hikmah (filsafat) dan al-Qur'an, budaya berpikir dalam implementasinya, sebagaimana dicontohkan oleh nabi, adalah tidak bebas nilai. Begitu pula ilmu sebagai produk berpikir tentu juga tidak bebas nilai. Dimana secara etika, ilmu harus dapat mensejahterakan kehidupan bukan sebaliknya. Ilmu sebagai sarana menemukan kebenaran berimpit dengan etika pelayanan bagi sesama manusia dan tanggung jawab agama.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah M. Amin, *Antara al-Gazali dan Khant: Filsafat etika Islam*, edisi terjemah oleh Hamzah, Bandung: Mizan, 2002

Asy'arie, Musa, *Konsep al-Qur'an Tentang Strategi Kebudayaan*, Dalam Abdul Basir Solissa, dkk. (ed), *al-Qur'andan Pembinaan Budaya Dialog dan Transformasi*, Yogyakarta: LESFI, 1993

-----, *Filsafat Islam Tentang Kebudayaan*, Yogyakarta: LESFI, 1999

Irfani

ISSN 1907-0969 E ISSN 2442-8272

Volume 14 Nomor 1 Juni 2018

Halaman 77-86

<http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ir>

-----, *Filsafat Islam Sunnah Nabi dalam Berpikir*, Yogyakarta, LESFI, 1999

Bagus, Lorens, *Kamus Filsafat*, cet. II, Jakarta: PT Gramedi Pustaka Utama, 2002

Bochenski, J. M., *Apa Sebenarnya Berpikir*, Dalam Jujun S. Suryasumantri (ed) *Ilmu Dalam Perspektif*, cet. XV. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001

Daldjoeni, N., *Hubungan Etika dengan Ilmu*, dalam Jujun S. Suryasumantri (ed), *Ilmu dalam Perspektif*, Cet. XV., Jakarta: yayasan Obor Indonesia, 2001

Fernanda, Desi., *Etika Organisasi Pemerintah*, Jakarta: Lembaga administrasi Negara, 2003

Hidayat, Komaruddin, *Imenafsirkan Kehendak Tuhan*, Jakarta: Penerbit teraju, 2004

Nasution, Harun., *Falsafah Agama*, Jakarta: Bulan Bintang, 1979

-----, *Teologi Islam: Aliran-aliran, Sejarah analisa Perbandingan*, Jakarta: UI-Press, 1986